

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di Benua Asia maka pengelolaan keuangan Indonesia sangatlah penting, karena dengan adanya pengelolaan keuangan Indonesia yang baik dan benar diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Maka dari itu peran pemerintah sangat penting dalam proses pengelolaan keuangan.

Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) untuk menjalankan tanggung jawab kebhendaharaan di wilayah kerja yang telah ditetapkan (pasal 8 (1) Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004). Dalam hal ini KPPN merupakan Kuasa BUN dimana memiliki tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan. Berdasarkan tipenya KPPN ada 5 (lima) salah satunya KPPN Tipe A2. Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pasal 31 KPPN tipe A2 memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran, serta melakukan penatausahaan baik dalam penerimaan maupun pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Singaraja merupakan salah satu KPPN Tipe A2 dan juga selaku Kuasa Bendahara Umum Negara berwenang untuk menguji permintaan pembayaran yang diajukan oleh K/L yang telah mengelola administrasinya sendiri untuk diterima atau ditolak agar dapat diterbitkan SP2D. KPPN Singaraja memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN yang dibentuk untuk melayani tagihan-tagihan yang menjadi beban atas APBN dengan menerbitkan SP2D dengan dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Ada berbagai jenis SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Singaraja, salah satunya SP2D Gaji Induk.

Proses penerbitan SP2D Gaji Induk oleh KPPN sangat penting karena tidak hanya menyangkut keluarnya uang negara tetapi juga menyangkut mengenai hak yang harus diterima para pegawai pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh pusat setiap bulannya. Maka dari itu, diperlukan ketelitian dan kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran agar tidak ada yang dirugikan dari pihak manapun, selain itu tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa hambatan dalam proses penerbitan SP2D yaitu (1) tidak terbacanya *barcode* SPM pada komputer, (2) kesalahan dalam memasukan data nomor rekening dari pihak satuan kerja, dan (3) adanya kesalahan dari Satker dalam memasukan Arsip Data Komputer (ADK). Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui proses penerbitan SP2D Gaji Induk, maka dari itu penulis mengambil judul **“Prosedur Penerbitan SP2D Gaji Induk Oleh KPPN Singaraja”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu ;

1. Apa yang dimaksud dengan SP2D Gaji Induk serta bagaimana prosedur dari penerbitan SP2D Gaji Induk oleh KPPN Singaraja.

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui apa itu SP2D Gaji Induk dan bagaimana prosedur penerbitan SP2D Gaji Induk oleh Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) Singaraja.

## **1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi :

1. Mahasiswa

Adapun manfaat yang diperoleh mahasiswa dengan adanya penelitian ini yaitu mahasiswa dapat menerapkan teori yang didapat semasa kuliah dalam dunia kerja, khususnya dalam instansi vertikal pemerintah. Manfaat lain yaitu mahasiswa dapat mengetahui bagaimana prosedur penerbitan SP2D Gaji Induk oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

2. Universitas Pendidikan Ganesha

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan ataupun yang hendak melakukan penelitian dalam hal prosedur penerbitan SP2D Gaji Induk

### 3. KPPN Singaraja

Dengan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi KPPN Singaraja

### 4. Satuan Kerja KPPN Singaraja

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi seluruh Satuan Kerja dari KPPN Singaraja mengenai bagaimana prosedur dari Penerbitan SP2D Gaji Induk oleh KPPN Singaraja.

